

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan melihat ke timur atau *Look East Policy* ini dimulai sejak tahun 1991, kebijakan ini dibuat pasca berakhirnya Perang Dingin dan menjadi awal kebijakan liberalisasi ekonomi di India. Pada masa awal pemerintahannya, Perdana Menteri Narsimha Rao mempromosikan reformasi ekonomi melalui strategi *Look East Policy*, yaitu dengan cara merubah pola pembangunan ekonomi India yang pasif dan cenderung tertutup menjadi lebih terbuka dan aktif dalam membangun hubungan dengan negara-negara luar. *Look East Policy* menjembatani hubungan India-ASEAN dan Negara anggota yang sempat merenggang pada era Perang Dingin, *Look East Policy* melewati 3 periode pemerintahan yang berbeda, yaitu Narsimha Rao, Atil Pajvae dan Manmohan Singh yang memerintah India pada 2004 – 2014 yang dianggap sebagai Perdana Menteri paling sukses dalam penerapan *Look East Policy*.

Dibuka kembalinya komunikasi antara India dan ASEAN melalu Mekong Ganga Cooperation menjadi salah satu jalan untuk India dalam menjalin kerjasamanya dengan Negara ASEAN, MGC yang beranggotakan Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam beserta Thailand telah bersama-sama menyepakati kerjasama dengan India dalam bidang ekonomi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proyek Koridor Timur-Barat dan jalan raya Trans-Asia yang diharapkan dapat menghubungkan Singapura dan New Delhi melalui Kuala Lumpur, Ho Chi

Minh, Phnom Pehn, Bangkok, Vientiane, Chiang Mai, Yangon, Mandalay, Kalembo, Tamu, Dhaka dan Kalkota adalah beberapa manuver yang dirintis keenam Negara anggota MGC untuk mempromosikan peningkatan infrastruktur. Konektivitas udara menjadi salah satu inovasi yang memberikan banyak kesempatan untuk India untuk lebih memudahkan korelasi kedua wilayah. Misalnya, kemudahan akses penerbangan dari Delhi ke Hanoi yang hanya membutuhkan waktu empat jam. Dalam proyek MGC telah disepakati mengembangkan penelitian bersama kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Hubungan bilateral antar India dengan Negara ASEAN khususnya CLMV pun terus berkembang, hingga pada tahun 2014, Perdana Menteri terpilih yaitu Narendra Modi, menginisiasi Act East Policy sebagai suksesor kebijakan terdahulunya. Ekonomi menjadi jantung kerjasama India – ASEAN dan Negara anggota dibawah kerangka Look East Policy namun investasi India di sub-kawasan terbilang cukup kecil dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang. India menempati urutan ke-27 di antara semua investor asing di Vietnam dengan 169 proyek dan total modal investasi sebesar US \$ 756 juta, Vietnam merupakan penerima ODI India terbesar dengan pangsa 54,9 persen, disusul Myanmar sebesar 39,8 persen. Sekitar 40 perusahaan India menginvestasikan US \$ 294,5 juta di Vietnam selama delapan tahun. Namun, hanya segelintir perusahaan besar India seperti ONGC Videsh, Marico Industries, TATA Group, Shapoorji Pallonji, RK Marble, Tufropes, dan Wolkem India yang menguasai lebih dari 80 persen investasi India di Vietnam. Beberapa Perusahaan

India kala bersaing dengan China, karena ketidakadilan pemerintah Vietnam dalam memperlakukan investor India dan China.

Kendala-kendala yang dihadapi India diantaranya, Dominasi Perusahaan Besar, Perusahaan India tidak sepenuhnya terinternasionalisasi, kurangnya konektivitas, ketersediaan dana pembangunan proyek yang memakan waktu lama, persaingan dengan Tiongkok yang dalam kenyataanya, India dengan kebijakan Look East dan Act East nya belum bisa membandingi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Bukan tidak mungkin India akan mengalahkan dominasi Tiongkok jika India mampu bersaing dan mengurangi factor-faktor yang menjadi penghambat kerjasama dibawah kerangka kebijakan Look East.

5.2 Saran

Look East dan Act East merupakan kebijakan yang memiliki prospek antara India-ASEAN namun kurangnya publikasi membuat masyarakat ASEAN tidak menyadari adanya kebijakan ini, saran penulis adalah agar dibentuk suatu platform yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat ASEAN untuk mengetahui tiap perkembangan kebijakan ini. Untuk meningkatkan kerjasama dua Negara saran penulis adalah:

a. Meningkatkan Kapasitas Kedutaan Besar India

Meningkatkan kapasitas kelembagaan kedutaan besar India untuk mengatasi masalah sektor swasta. Saat ekonomi India semakin terintegrasi dengan ekonomi global dan sektor swasta India menjadi lebih ambisius dan berpandangan

ke luar, ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan India, dalam hal ini adalah kedutaan besar untuk mengatasi masalah sektor swasta, di satu sisi, dan memajukan kepentingan mereka di sisi lain. Kedutaan Besar India juga perlu memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan India dapat beroperasi dengan lancar di negara-negara tersebut.

b. Bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Tujuan Kerjasama

Bernegosiasi dengan negara-negara CLMV khususnya untuk perlakuan non-diskriminatif terhadap perusahaan India. Pemerintah di negara-negara CLMV tidak boleh memperlakukan satu perusahaan dan lainnya berbeda. Pengalaman TATA Group di sektor baja di Vietnam adalah masalah yang sangat memprihatinkan. TATA Group tidak mendapatkan kontrak karena kalah saing dengan perusahaan Cina yang bahkan minim pengalaman, didorong dengan pemberlakuan pajak kepada TATA Group oleh pemerintah Vietnam yang melanggar undang-undang Negara Vietnam. Contoh seperti itu menimbulkan ketakutan di antara calon investor India lainnya yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut.

c. Pelaksanaan Proyek Infrastruktur yang Cepat.

Lambatnya kemajuan proyek infrastruktur yang didanai oleh LoC India berpotensi menodai citra India sebagai mitra pembangunan. Upaya yang tulus harus dilakukan untuk mempercepat proyek LoC. India harus menarik pelajaran dari pengalaman negara lain yang memiliki catatan lebih baik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

d. Membantu menciptakan infrastruktur kesehatan yang efisien dan staf medis yang berkualifikasi di negara-negara CLMV.

Menurut Sinate et al (2018), India harus meningkatkan eksistensinya di bidang kesehatan negara-negara CLMV melalui cara-cara berikut:

- i Menyediakan infrastruktur perawatan kesehatan seperti rumah sakit, dokter spesialis, dan klinik
- ii Memperbaiki sistem Unit Gawat Darurat
- iii Membangun kapasitas di sektor kesehatan
- iv Memperkenalkan skema asuransi berbiaya rendah di wilayah tersebut
- v Mempromosikan pariwisata medis

Pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan keterampilan dan kerjasama dalam bidang kesehatan merupakan alat penting untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara penerima bantuan. Diplomasi kesehatan adalah salah satu cara terbaik India untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara CLMV.